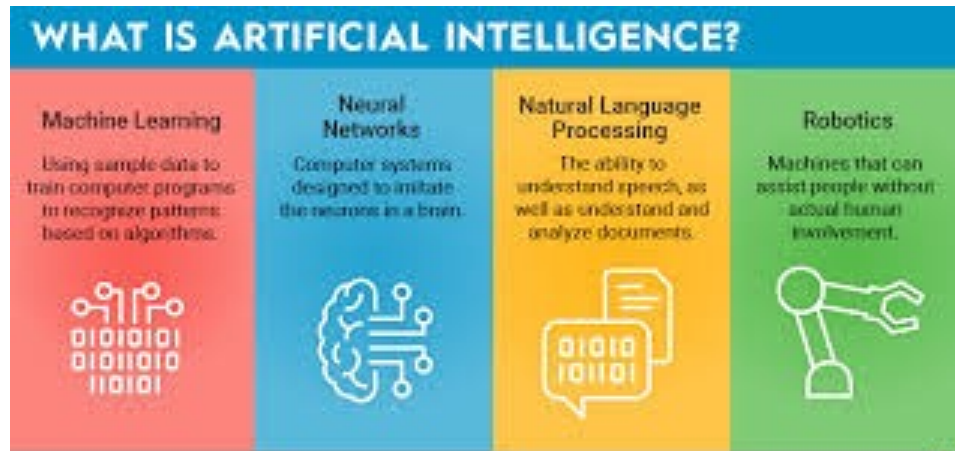


# Indonesia Internet Governance Academy 2024

## Internet dan AI



**Hario Bismo Kuntarto**

Head of Digital Economy, Game and AI Governance Team  
Directorate Application Informatics Governance  
Ministry Communications and Informatics

System  
Electronics

Emerging  
Technology

Game

Domain .ID

# Indonesia AI Opportunities



77 % Device users use AI technology on their respective devices



26,7 Millions of Indonesian workers are helped by AI

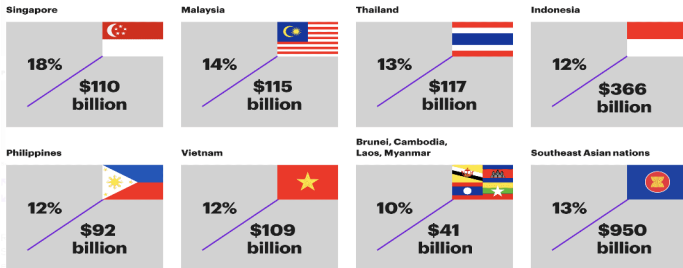


71% survey respondents expressed concerns about AI-assisted fraud

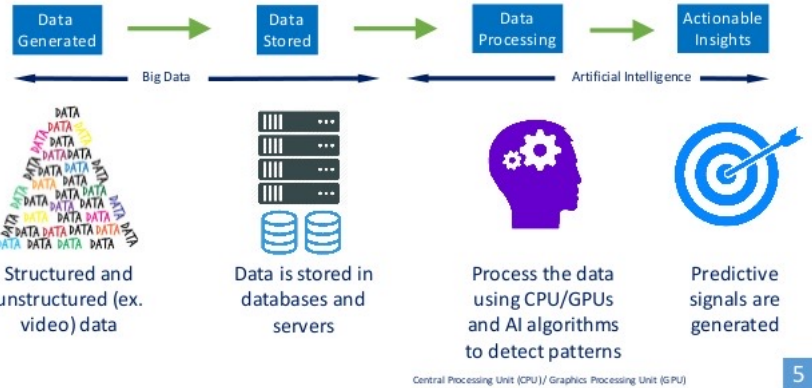
(Kompas, 2023; McKinsey & Company; TechJury, 2023 ; Statista, 2023)

AI is expected to provide a 10 to 18 percent uplift in GDP across Southeast Asia by 2030

Economic impact of AI in 2030 (% of 2030 GDP)



## The Process

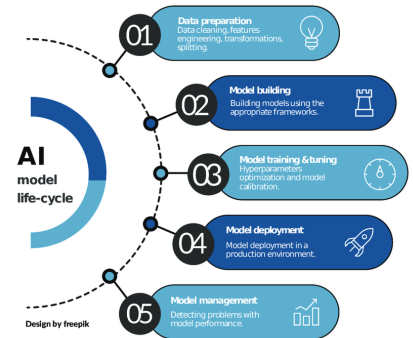


Source: <https://devopedia.org/artificial-intelligence>

## The Five Stages of Change



Source: <https://antonybell.com/leading-your-people-through-difficult-change/>



# Kebijakan Strategis Pemerintah terkait AI

## Policy: Tata Kelola AI Indonesia

### Indonesia menggabungkan pendekatan Horizontal dan Vertikal

#### Horizontal

Penyusunan kebijakan terkait teknologi AI yang berlaku untuk seluruh sektor industri.

UU ITE

UU PDP

#### Surat Edaran Etika Kecerdasan Artifisial / AI

Kementerian Kominfo telah mengeluarkan **Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial** sebagai panduan pengembangan AI.



Pengertian Kecerdasan Artifisial



Panduan Umum Nilai dan Etika



Tanggung Jawab dalam Pemanfaatan dan Pengembangan AI

#### Vertikal

Penyusunan kebijakan terkait AI bersifat sektoral yang berlaku di sektor industri tertentu.

#### Sektor Keuangan

**Panduan OJK tentang Kode Etik AI yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya**

#### Sektor Kesehatan

**Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 serta ketentuan perubahannya**

#### Sektor Pendidikan

Kemendikbudristek sedang **dalam tahap pengkajian bersama UNESCO** mengenai penggunaan AI di sektor pendidikan

## People: Pengembangan SDM

### Digital Talent Scholarship (DTS)



Salah satu program pengembangan kompetensi talenta digital yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM di bidang digital, salah satunya *Artificial Intelligence*.

## Platform: Adopsi Teknologi

Penggunaan platform komunikasi dan informasi teknologi yang inklusif bagi para pemangku kepentingan

*\*Disampaikan pada acara UK AI Safety Summit*

### Aspek Pemanfaatan Teknologi



Mengidentifikasi *tools* yang tepat dalam penyusunan komunikasi publik (bersifat *assisting* atau *augmenting*)




















Pemanfaatan AI secara spesifik di berbagai tahap mulai dari riset, perencanaan, evaluasi, dan visualisasi

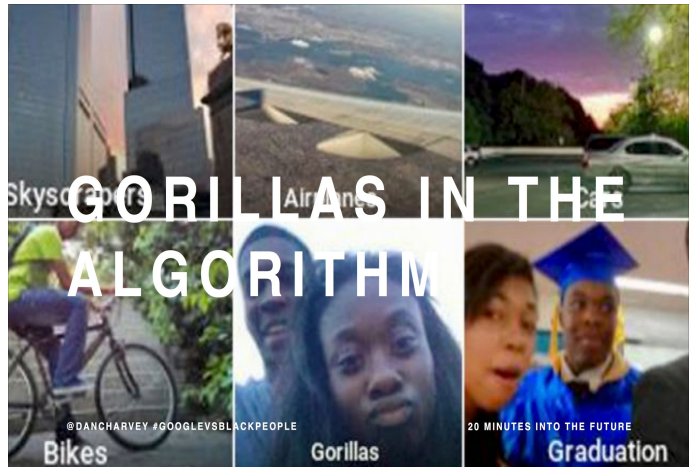


Memperhatikan etika pemanfaatan AI, belajar dari berbagai praktik baik, dan memperhatikan aspek *human dimension*

(Chartered Institute of Public Relations, 2023)

## Global - AI GOVERNANCE

2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
 General Data Protection Regulation Enforced	 Protection of Personal Information Act (PDPi) Enforced   Legal Framework for AI Proposed	Unesco - Recommendation on Ethics	 Algorithmic Accountability Act Proposed   China Algorithm Recommendation Management Regulation Enforced   EU AI Liability Directive 2022 Proposed   The Digital Charter Implementation Act Proposed	 NYC AI hiring law Enforced   China Deep Synthesis law Enforced   California Privacy Rights Act Enforced   EU AI Act Adopted	The Executive Order Joe Biden  G7 - Hiroshima Process on Generative AI	 EU AI Act Enforced  UN General Assembly Seizing the opportunities of safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems for sustainable development
	 Industrial Classification (KBLI), defines AI as low risk	 MR - MCI 3/2021 defines standard, norm, procedure and criteria.	 Evaluating, defining and collaborating related industry obligation	 MCI Circular Letter 9/2023 - the use of AI in an ethical manner.	 Reporting, evaluating, adopting and govern	



“

These systems are not used to improve people's access to welfare, they are used to cut costs. And when you already have systemic racism and discrimination, these technologies amplify harms against marginalized communities at much greater scale and speed.

Mher Hakobyan, Amnesty International's Advocacy Advisor on AI Regulation



### Benefits of AI in the energy industry

- Efficient energy production
- Reduced carbon emissions
- Reduced costs
- Safer working environment
- Better customer appeal





<b>Dampak Baik</b>	<b>Dampak Bahaya</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas [2], [3], [4], [5]</li> <li>• Inovasi [6], [7]</li> <li>• Media pembelajaran[8], [9]</li> <li>• Penciptaan lapangan pekerjaan baru [3], [10]</li> <li>• Meningkatkan strategi marketing [11]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangguran struktural dan ketidakadilan ekonomi [12]</li> <li>• Keamanan siber dan privasi [12], [13], [14]</li> <li>• Penilaian nilai pasar perusahaan [15]</li> <li>• Tekanan psikologi dan ketidakamanan pekerjaan [13]</li> <li>• Bias dan ketidakadilan pendidikan [16]</li> <li>• Ketergantungan berlebihan pada teknologi [14]</li> <li>• Etika dan transparansi [16]</li> <li>• Ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia[17]</li> </ul>

## Internet & AI Governance : Open Discuss

# Internet & AI Governance : Open Discuss

Government

Academia

Private Sector

Civil Society

1. Bagaimana inovasi teknologi dapat hadir bersamaan dengan pemerataan ekonomi?
2. Bagaimana Indonesia dapat berperan dalam penyusunan tata Kelola AI di tingkat global?
3. Bagaimana Inovasi dapat memastikan bahwa penerapan AI mendukung inklusifitas dan pembangunan yang adil?
4. Bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan pengembangan AI yang inovatif dengan perlindungan hak asasi manusia dan privasi?
5. Apa peranan sector swasta dalam memastikan AI dikembangkan dengan memperhatikan prinsip etis dan berkelanjutan?
6. Bagaimana Indonesia dapat memastikan AI tidak memperburuk ketimpangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan?
7. Bagaimana tata Kelola AI dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan?
8. Bagaimanan Indonesia dapat mengembangkan talenta local di bidang AI sambil terhubung dengan standar global?
9. Bagaimana Indonesia dapat menghindari ketergantungan pada teknologi AI asing dan membangun ekosistem AI local yang mandiri?

